BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Perkembangan Kotip Cimahi

Kota Administratip Cimahi terletak dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat Jawa Barat, setelah kota Administratip Bitung dan Kota Administratip Banjar Baru, peresmiannya dilaksanakan pada tangggal 29 Januari 1976 oleh menteri Dalam Negri (Bapak Amir Machmud, almarhum).

Luas Areal Kota Administratip Cimahi 4.036,780 Ha, dilihat topografi mempunyai kemiringan 15° membujur dari Utara ke selatan dengan jumlah penduduk 351.283 jiwa dengan perincian laki-laki 177.011jiwa, perempuan 174.272 jiwa dengan kepadatan penduduk 86 jiwa/Ha, dan terletak diatas dataran tinggi yang bervariasi antara 600-1000 meter dari permukaan laut dengan temperatur 20°C-24°C.

Pembentukan Kota Administratip Cimahi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975, adalah untuk meningkatkan kegiatan penyeleggaraan secara berhasil guna dan berdaya guna, merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan pendorong bagi usaha peningkatan laju pembanggunan atas dasar tersebut Kota Cimahi di pandang perlu untuk menjadi Kota Administratip. Selain dari dari pada hal tersebut kota Administratip Cimahi mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Barat, melalui SK Gubernur No 1.31/SK-941-Pemda/83. Kedudukan Kota Administratip adalah bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, di mana pada kegiatan pelaksanaannya, pemerintah

Kota Administratip Cimahi bertanggung jawab pada pemerintah Kabupaten Bandung.

3.2. Dasar Hukum

Dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Kota Administratip Cimahi serta untuk lebih mendewasakan Pemerintah Kota Administratip Cimahi agar lebih mampu untuk menggurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak, pemerintah Kabupaten Bandung yang di peroleh dari Wilayah Kota Administratip.

Dengan peraturan Daerah ini ditentukan besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak yang di peroleh dari wilayah kota Administratip Cimahi untuk menggunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pemerintah Kota Administratip Cimahi dan pembangunan.

Pembentukan Kota Administratip ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1975, Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar 1945.
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Proponsi Jawa Barat.
4. Undang–undang no 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 nomor 33, tambahan lembaran Negara 30,37).

3.3 Bidang Pemerintahan

Sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1974, serta peraturan perundang undangan yang lainnya, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian kepemimpinan walikota dalam kapasitasnya sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mencakup pula penyelenggaraan koordinasi, pembinaan keamanan dan ketertiban serta tugas-tugas lain yang tidak termasuk tugas-tugas instansi lainnya.

Tugas pokok administrator pemerintahan tidak terlepas dari hubungan koordinasi antara wali Kota Cimahi dengan pemerintah atasan, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta instansi/dinas/lembaga ertikal dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang merata dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan berpedoman pada kepada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1988, yang dijabarkan dalam inmendagri no. 18 tahun 1989 pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui rapat-rapat briefing dan kegiatan lainnya.

3.4 Bidang Aparatur Pemerintahan

Untuk meningkatkan mutu dan pengabdian serta keahlian aparatur pemerintah agar tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan permasyarakatan juga dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kotip Cimahi telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur,

sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah sebagian besar tergantung dari sikap dan perilaku aparat pelaksanaannya, maka pambinaan terhadap para pegawai selalu mendapat perhatian yang bertujuan membina pegawai yang handal.

Begitu pula dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan pelaksanaan tugas kepada mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang bersipat formal maupun pendidikan kursus yang erat kaitannya dengan kedinasan dalam upaya pembinaan karir dan keahlian.

Untuk terpeliharanya ketertiban dan kelancaran tugas, selalu dilakukan pembinaan agar tercapai aparatur yang bersih berwibawa bersemangat dan mempunyai dedikasi yang tinggi senantiasa dilakukan usaha-usaha secara terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Melaksanakan apel pagi.
2. Melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17 setiap bulannya.
3. Mengikut sertakan para pegawai pada latihan/pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah atasan berupa tugas belajar dan pemberian ijin belajar kepada pegawai atas prakarsa sendiri.
4. Meningkatkan porum koordinasi berupa rapat koordinasi pengarahan atasan dan rapat kerja staf setiap bulannya.
5. Untuk aparat bawahan, dilakukan pembinaan secara berkala baik untuk meningkatkan kemampuan personil maupun pembinaan ketatausahaan.

6. Dalam hal pengamanan kantor, selalu dilakukan piket kantor oleh pegawai negri sipil maupun satpol PP Kotip Cimahi selama 24 jam.
7. Memberi kesempatan kepada semua karyawan dan karyawati untuk berolah raga pada setiap hari jumat pagi selama satu jam.

3.5. Bidang Kemasyarakatan

3.5.1 Bidang Keagamaan

Pembangunan kehidupan beragama diwilayah Kotip Cimahi telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan suasana kehidupan beragama yang semarak dan pembinaan kerukunan antar umat beragama agar tetap terpelihara dengan baik.

3.5.2. Bidang Peranan Wanita

Langkah dan upaya yang dilaksanakan selaras dengan tujuan maupun sasaran pembinaan dan pengembangan peranan wanita yang meliputi:

1. Pemasyarakatan program nasional melalui PKK, dharma wanita dan Organisasi wanita.
2. Keterlibatan wanita dalam berbagai kegiatan pemerintah kota.
3. Pengembangan kelompok PKK RW/RT dan kader Dasawisma.
4. Pengadaan perlengkapan, sarana olah raga dan kesenian.
5. Pengadaan dan pemberian penunjang prestasi.

3.5.3 Bidang Pendidikan

pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan kepada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.5.4 Bidang Kebudayaan

Pembinaan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri kebangsaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya.

3.5.5 Bidang Olah raga

Langkah dan upaya yang dilaksanakan selaras dengan tujuan maupun sasaran pembinaan pengembangan olah raga meliputi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga.
2. Mengikutsertakan atlit-atlit dalam even yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait.
4. Mengirimkan peserta untuk penataran dan penyuluhan.
5. Mengadakan perlombaan-perlombaan.
6. Memberikan motifasi kepada para penggusaha dan tokoh masyarakat, agar menanamkan modalnya dalam pembangunan sarana olah raga.

3.6. Bidang Sosial Politik

Kondisi sosial politik wilayah kota administratip Cimahi sampai saat ini dalam keadaan cukup mantap, setabil dan terkendali, hal ini karena adanya jalinan kerja sama antara aparat, instansi terkait, dan masyarakat. Upaya pembinaan sosial politik yang telah dilaksanakan.

3.6.1. Upaya Pembinaan Terhadap Bekas Tahanan G-30-S/PKI

Pembinaan diarahkan pada upaya mempercepat perubahan sikap mental dari idiologi komunis ke idiologi pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta menempatkan mereka ditengah-tengah masyarakat pancasila, ikut berperan serta secara aktip mensukseskan program pemerintah dan mambawa masyarakat yang berbangsa dan bernegara, serta beragama.

Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk pengamatan bagi bekas tahanan dan narapidana G-30-S/PKI yang datang, pindah, meninggal dunia dilaporkan secara rutin kepada bupati kepala daerah tingkat II Bandung.

Bentuk-bentuk koordinasi dan konsultasi dalam pendataan bekas tahanan dan narapidana G-30-S/PKI dengan unsur muspida dilaksanakan setiap saat pada rapat mingguan dikecamatan/Dinas terkait pada setiap bulan.

3.6.2. Upaya Pembinaan Umum Masyarakat

Secara umum pembinaan masyarakat diarahkan pada peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa yang dilandasi semangat kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila dan mengaktualisasikannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik secara pribai maupun dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan, menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945,tetap terpeliharanya kesinambungan Pembangunan Nasional, dengan cara:

1. Pebinaan terhadap masyarakat umum, Ormas Wanita, Propesi Yayasan Sosial/Pendidikan dan Agama.
2. Mengadakan koordinasi dengan seluruh unit kerja Dinas/Instansi yang dipandang perlu dalam menciptakan stabilitas Sosial politik yang kondusip.

3.6.3. Upaya Pembinaan Kesatuan Bangsa

Diarahkan kepada pemantapan - pemantapan idiologi negara melalui pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dilingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Dinas instansi, sekolah-sekolah mulai tingkat Taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, serta mengaktualisasikannya pada perilaku kehidupan sehari-hari baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.agar dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat berbangsa dan bernegara agar dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk WNI keturunan melalui pembinaan kegotong-royongan dan kepedulian sosial.

Pembinaan pembauran dilaksanakan melalui wadah atau lembaga yang ada yaitu Badan Komunikasi penghayatan kesatuan bangsa sehingga terjalin komunikasi dan informasi pembangunan sehingga dapat diserap oleh WNI keturunan dan ikut bergerak sebagai pelaku-pelaku pembangunan.

3.6.4. Upaya Pembinaan Pertahanan Sipil

Dalam upaya meningkatkan keamanan lingkungan, maka peranan Hansip tetap diupayakan agar dapat berjalan sesuai dengan proporsinya. Meskipun akan diperlakukan Rakyat Terlatih (Ratih). Upaya pembinaan yang telah dilaksanakan sampai saat ini adalah:

Pembinaan organisasi terhadap anggta Hansip dan kasatgas kecamatan dan kelurahan, untuk meningkatkan pengetahuan para anggota Hansip yang diambil dari kelurahan untuk mengikuti pendidikan suskalak yang di laksanakan di tingkat Kabupaten Bandung.

Menggadakan koordinasi dengan Kamawil Hansip di tiap Kecamatan Cimahi

3.7. Jumlah Pegawai Kotip Cimahi

Perincian Beseting pegawai diwilayah kota administratip cimahi berdasarkan golongan adalah:

1. Golongan	IV b	1 orang
	IV a	1 orang
2. Golongan	IIId	6 orang
	c	5 orang
	b	23 orang
	a	69 orang
3. Golongan	II d	107 orang
	c	27orang
	b	37orang

4. Golongan	I d	39 orang
	c	22 orang
	b	17 orang
	a	9 orang
5. ABRI		16 orang
Harian		43 orang
Tenaga Kontrak		94 orang
Sukwan		31 orang